

THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE, COMPANY CHARACTERISTICS AND AUDIT QUALITY ON ANTI-CORRUPTION DISCLOSURE IN ENERGY SECTOR COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE IN THE PERIOD 2022-2024

Burhanuddin¹ dan Ramma Nadia Putri^{2*}

^{1,2}Universitas Islam Riau

Email: burhanudin@eco.uir.ac.id¹ dan rammanadiaputri@student.uir.ac.id^{2*}

*Corresponding author

DOI: <https://doi.org/10.35145/bilancia.v10i1.5803>

Received: 23/02/2026, Revised: 26/03/2026, Accepted: 27/03/2026

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the influence of the board of commissioners, concentrated ownership, company characteristics, and audit quality on energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2022-2024 period. The population of this study was 91 energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The sample was selected using purposive sampling, resulting in 71 companies meeting the research criteria. Data analysis used multiple linear regression analysis. The results indicate that the board of commissioner variables have no significant effect on anti-corruption disclosure. Concentrated ownership, company characteristics and audit quality variables do influence anti-corruption disclosure.

Keywords: *Anti-corruption disclosure, board of commissioners, concentrated ownership, company characteristics, audit quality*

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN ANTIKORUPSI PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2022-2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel dewan komisaris, kepemilikan terkonsentrasi, karakteristik perusahaan dan kualitas audit pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024. Populasi pada penelitian ini sebanyak 91 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 71 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan antikorupsi. Sebaliknya, kepemilikan terkonsentrasi, karakteristik perusahaan, dan kualitas audit menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan antikorupsi.

Kata kunci: Pengungkapan antikorupsi, dewan komisaris, kepemilikan terkonsentrasi, karakteristik perusahaan, kualitas audit

PENDAHULUAN

Setiap bisnis yang dijalankan pada umumnya menimbulkan dampak bagi sosial maupun lingkungan. Oleh karena itu, sebuah entitas perlu untuk mempertanggungjawabkan sumber daya yang dikelola kepada para pemangku kepentingan. Hal ini guna bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab. Untuk mengkomunikasikan aktivitas serta dampaknya pada para pemangku kepentingan, perusahaan melakukan pengungkapan informasi yang terdiri dari pengungkapan finansial dan non-finansial (Tyas & Rahmawati, 2023). Pengungkapan kebijakan anti-korupsi yang termasuk pada pengungkapan non-finansial merupakan suatu bentuk transparansi yang mencerminkan tanggung jawab perusahaan dalam memberantas praktik korupsi (Zulfani & Solichin, 2025). Program ini umumnya mencakup kebijakan seperti larangan suap, pengendalian gratifikasi, serta pembentukan dan penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*).

Korupsi itu sendiri merupakan tindakan perlawanan terhadap hukum yang mengakibatkan kerugian demi mencapai kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Apabila tindakan korupsi ini dibiarkan maka dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi pendapatan, melemahkan kepercayaan publik, dan akhirnya mengakibatkan menurunnya tingkat investasi. Menurut data dari *Transparency Internasional*, Indonesia menduduki peringkat 85 dari 180 negara yang ada di dunia pada tahun 2019 dengan skor Indeks Persepsi Korupsi sebesar 40. Jika diukur dengan skala 0-100, maka semakin rendah skor Indeks Persepsi Korupsi maka tingkat korupsi akan semakin tinggi. Data tersebut menandakan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih cukup tinggi karena Indonesia memperoleh skor 40 atau belum setengah dari skala tertinggi.

Korupsi dalam korporasi telah menjadi isu penting dalam perdebatan akademis dan masyarakat umum. Isu korupsi layak masuk dalam konstitusi bukan hanya karena termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa, tetapi juga karena menjadi isu yang tak akan pernah berakhir untuk diberantas. Berdasarkan *Transparency International Indonesia* (TII) menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2020 masih berada pada peringkat 102 dari 180 dengan skor 37/100 yang menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih relatif tinggi (Ramadhan & Rastika, 2021) dan ditahun 2022 Menurunnya skor menjadi 34 dan di tahun 2024 mengalami kenaikan drastic menjadi skor 37/100 kembali pada peringkat 99 dari 180 negara (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2025). Seperti halnya kasus korupsi yang terjadi pada PT Timah rugi Rp 271 Triliun, atas kerugian negara yang diakibatkan oleh hasil korupsi, para pelaku korupsi melakukan eksplorasi tambang timah secara ilegal. Dengan angka yang dikeluarkan oleh tim penyidik bukan hanya kerugian negara yang rill, melainkan juga dampak kerugian perekonomian negara (Aprilia, 2024). Dan dilanjutkan dengan auditor BPKP yang penjelasan Perhitungan Kerugian Keuangan sebesar Rp 300 Triliun. Total kerugian itu diperoleh dari penyimpangan pada kerja sama sewa smelter, pembelian biji timah, dan kerusakan lingkungan. Jadi, kerugian akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan mencapai Rp 271 Triliun. Sehingga menjadi total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 300 Triliun (Budi, 2024).

Berdasarkan laporan *Transparency International Indonesia* tahun 2024, nilai pengungkapan kebijakan antikorupsi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan masih tergolong rendah. Sebagian besar perusahaan hanya memperoleh skor antara 10% hingga 30%, yang mengindikasikan bahwa upaya transparansi dan komitmen terhadap pencegahan korupsi belum optimal. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan tertinggi adalah PT Bukit Asam Tbk dengan nilai 60%. Sementara itu, PT Vale Indonesia Tbk dan PT Aneka Tambang Tbk masing-masing memperoleh nilai 30%. Selanjutnya, beberapa perusahaan seperti PT Agincourt Resources, PT Baramulti Suksessarana, dan PT Mitrabara Adiperdana Tbk menunjukkan tingkat pengungkapan sebesar 20%. Adapun PT Adaro Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara masing-masing memperoleh nilai 10%. Di sisi lain, PT Timah (Persero) Tbk memiliki tingkat pengungkapan terendah yaitu sebesar 0%, yang menunjukkan belum adanya pengungkapan kebijakan antikorupsi secara eksplisit dalam laporan perusahaan. Perbedaan skor tersebut menggambarkan adanya variasi tingkat kepatuhan dan transparansi antikorupsi antarperusahaan dalam sektor energi di Indonesia (Atikah et al., 2024).

Good Corporate Governance (GCG) sebagai salah satu bentuk pengendalian internal sangat perlu dilakukan untuk meminimalisir segala bentuk perilaku menyimpang yang ada di perusahaan, termasuk tindakan korupsi. Menurut (Widada et al., 2019) GCG merupakan sebuah konsep yang harus diimplementasikan oleh perusahaan guna meminimalisir bentuk ketimpangan antara manajer dan investor. GCG mampu digunakan sebagai alat untuk mencegah korupsi karena melalui penerapan asas responsibilitas dan transparansi menjadi kunci utama terciptanya keterbukaan informasi di perusahaan.

Konsentrasi kepemilikan merupakan suatu ukuran dari keberadaan pemegang saham yang relatif dominan dalam sebuah perusahaan. Terdapat 2 jenis kepemilikan jika dilihat dari jumlahnya yaitu kepemilikan terkonsentrasi atau mayoritas dan kepemilikan menyebar atau minoritas. Konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring. Kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki oleh manajer sehingga praktik manajemen laba pun dapat diminimalisir (Roodposhti & Chashmi, 2011).

Pengaruh *Good Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Audit terhadap Pengungkapan Antikorupsi pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024 (Burhanuddin dan Ramma Nadia Putri)

Dewan komisaris merupakan jabatan perusahaan yang berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan, khususnya kebijakan dan pengelolaan, serta memberikan saran kepada Direksi. Hubungannya dengan pengungkapan antikorupsi adalah dewan komisaris memiliki peran penting dalam memastikan perusahaan menerapkan kebijakan dan prosedur antikorupsi yang efektif. Perusahaan cenderung lebih transparan dalam mengungkapkan kebijakan anti-korupsi ketika dewan komisaris memiliki tingkat independensi yang tinggi. Dan lebih lanjut menurut Safelia et al. (2023) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berkontribusi untuk menaikkan citra perusahaan melalui kontrol agar lebih ketat terhadap laporan keuangan, sehingga mengurangi kemungkinan manipulasi yang dapat mengarah pada praktik korupsi.

Karakteristik perusahaan dapat didefinisikan sebagai ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha (Sidharta & Christianti, 2007). Karakteristik perusahaan yang muncul karena adanya perbedaan kegiatan operasional dan faktor lain yang berasal dari dalam perusahaan. Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan antikorupsi dalam laporan tahunan secara sukarela. Karakteristik perusahaan mendapat perhatian penting dalam penelitian tersebut karena peneliti berangkat bertitik tolak dari pemikiran bahwa sejauh mana pengungkapan sukarela oleh perusahaan sangat tergantung pada perbandingan antara biaya dan manfaat pengungkapan antikorupsi, dan perbandingan biaya manfaat tersebut akan sangat ditentukan oleh karakteristik-karakteristik tertentu dari perusahaan yang bersangkutan.

Kualitas audit merupakan sebuah tanggung jawab bagi seorang auditor untuk menjaga nama baik serta kepercayaan publik terhadap KAP. Informasi tersebut akan menjadi dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan bisnis, dan pengguna laporan keuangan bisa melihat bahwa auditor yang asalnya dari KAP Big Four akan memberikan jasa audit dengan kualitas yang lebih baik. Audit berkualitas tinggi harus mencakup proses pengumpulan dan analisis informasi yang cukup, serta penyajian temuan dan rekomendasi secara obyektif dan akurat (DeAngelo, 1981). Maka dapat dikatakan bahwa dengan kualitas audit yang dihasilkan, segala kemungkinan auditor untuk menemukan kesalahan seperti pelanggaran yang ditemukan pada laporan keuangan didalam sistem akuntansi kliennya dapat dideteksi dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian dari Rissdiana & Riduwan (2023), bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Selanjutnya penelitian Hayati et al. (2025), bahwa dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan antikorupsi. Kemudian yang dilakukan oleh Zulfani & Solichin (2025), bahwa kepemilikan konsentrasi berpengaruh terhadap pengungkapan Antikorupsi. Sedangkan penelitian dari Putri & Yustisi (2022), bahwa kepemilikan konsentrasi tidak memiliki hubungan dengan pengungkapan Antikorupsi. Selain itu, factor yang mempengaruhi Pengungkapan Antikorupsi yaitu karakteristik perusahaan yang diteliti oleh Permatasari & Prastiwi (2023) adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan antikorupsi. Namun penelitian yang dilakukan oleh Graciella et al. (2023) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Antikorupsi. Dan selanjutnya yang mempengaruhi Pengungkapan antikorupsi yaitu kualitas audit yang dilakukan oleh Indarto (2023), bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan antikorupsi. Sedangkan bertolak belakang dengan penelitian Achmad (2018), bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan antikorupsi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang meneliti variabel yang sama dalam penelitian ini masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga masih diperlukan penelitian ulang untuk menguji hubungan antara variabel ini. Penulis melakukan penelitian yang merupakan replikasi dari penelitian Zulfani & Solichin (2025) tentang *good corporate governance*, Tingkat Kepemilikan Pemerintah dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Antikorupsi Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zulfani & Solichin (2025) yaitu peneliti memodifikasi variabel independent berupa kepemilikan terkonsentrasi dan karakteristik Perusahaan serta objek yang digunakan berupa perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan kebijakan antikorupsi. Beberapa penelitian menemukan bahwa dewan komisaris, kepemilikan terkonsentrasi, ukuran perusahaan, dan kualitas audit berpengaruh terhadap pengungkapan antikorupsi, sementara penelitian lainnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Ketidakkonsistenan tersebut menunjukkan masih adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Zulfani & Solichin (2025), dengan beberapa perbedaan. Perbedaan utama terletak pada modifikasi variabel independen, yaitu penggunaan kepemilikan terkonsentrasi dan karakteristik perusahaan, serta objek penelitian yang difokuskan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen), di mana agen diberi mandat untuk mengelola perusahaan demi kepentingan prinsipal. Dalam hubungan tersebut sering muncul konflik kepentingan (*agency conflict*) akibat adanya asimetri informasi, karena manajemen memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan pemegang saham. Silaban & Suryani (2020) menyatakan bahwa dalam kemitraan ini, prinsipal juga menyerahkan

kewenangan pengambilan keputusan kepada agen, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan untuk memastikan kepentingan kedua belah pihak tetap selaras. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta transparansi melalui pengungkapan kebijakan, termasuk kebijakan antikorupsi. Hartomo & Silvia (2019) menegaskan bahwa transparansi antikorupsi perlu diformalkan dalam bentuk pengungkapan kebijakan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi penyimpangan dalam lingkungan korporasi. Dengan demikian, teori keagenan menjadi landasan utama dalam menjelaskan pentingnya mekanisme pengawasan dan pengungkapan sebagai upaya meminimalkan konflik kepentingan dalam perusahaan.

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan penerimaan dari masyarakat dengan memastikan aktivitas operasionalnya selaras dengan norma, nilai, dan harapan sosial yang berlaku (Wiyuda & Pramono, 2017). Legitimasi tercapai ketika terdapat kesesuaian antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat, sehingga keberadaan perusahaan dapat diterima oleh lingkungan sosialnya (Dewi & Dewi, 2017). Untuk menjaga legitimasi tersebut, perusahaan perlu mengkomunikasikan tanggung jawab sosialnya melalui pengungkapan informasi yang transparan (Berthelot & Robert, 2011). Dalam konteks ini, pengungkapan antikorupsi menjadi salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam menunjukkan kepatuhan terhadap norma etika dan tuntutan publik. Dengan demikian, teori legitimasi menjadi landasan dalam menjelaskan bahwa perusahaan melakukan pengungkapan antikorupsi sebagai strategi untuk mempertahankan kepercayaan dan keberlanjutan usahanya di tengah tekanan sosial dan pengawasan publik.

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Antikorupsi

Dewan komisaris berperan dalam mengawasi dan memberikan nasihat kepada manajemen guna memastikan perusahaan dikelola sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Hayati et al., 2025). Dalam perspektif teori keagenan, keberadaan dewan komisaris sebagai mekanisme pengawasan internal bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan dan asimetri informasi antara prinsipal dan agen (Permatasari & Prastiwi, 2023). Ukuran dewan komisaris yang lebih besar dapat menghadirkan keberagaman perspektif dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen, sehingga berpotensi mendorong transparansi informasi, termasuk pengungkapan kebijakan antikorupsi. Dengan kewenangan yang dimiliki, dewan komisaris diharapkan mampu menekan manajemen untuk meningkatkan akuntabilitas melalui pengungkapan yang lebih luas.

H₁ : Dewan Komisaris Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Antikorupsi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024

Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi Terhadap Pengungkapan Antikorupsi

Kepemilikan terkonsentrasi merujuk pada kondisi di mana satu atau beberapa pemegang saham memiliki porsi kepemilikan yang signifikan dalam perusahaan (Porta et al., 1999). Dalam teori keagenan, struktur kepemilikan ini berperan dalam meminimalkan konflik antara manajemen dan pemegang saham melalui peningkatan fungsi monitoring (Jensen & Meckling, 1976). Namun, kepemilikan terkonsentrasi juga dapat menimbulkan konflik keagenan tipe II antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Shleifer & Vishny, 1996). Untuk mengurangi potensi konflik tersebut, perusahaan perlu meningkatkan transparansi melalui pengungkapan sukarela, termasuk pengungkapan kebijakan antikorupsi. Oleh karena itu, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi diharapkan mendorong peningkatan pengawasan dan transparansi perusahaan.

H₂ : Kepemilikan Terkonsentrasi Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Antikorupsi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024

Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Antikorupsi

Karakteristik perusahaan, khususnya ukuran perusahaan, mencerminkan tingkat eksposur publik dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang lebih besar cenderung berada di bawah tekanan publik yang lebih tinggi dan mendapat perhatian lebih luas dari masyarakat (Serafeim, 2013). Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan besar memiliki dorongan lebih kuat untuk menjaga reputasi dan mempertahankan penerimaan sosial dengan mengungkapkan informasi yang relevan, termasuk kebijakan antikorupsi (Tirtasari & Hartomo, 2019). Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula kecenderungannya untuk melakukan pengungkapan antikorupsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan strategi menjaga legitimasi.

H₃ : Karakteristik Perusahaan Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Antikorupsi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024.

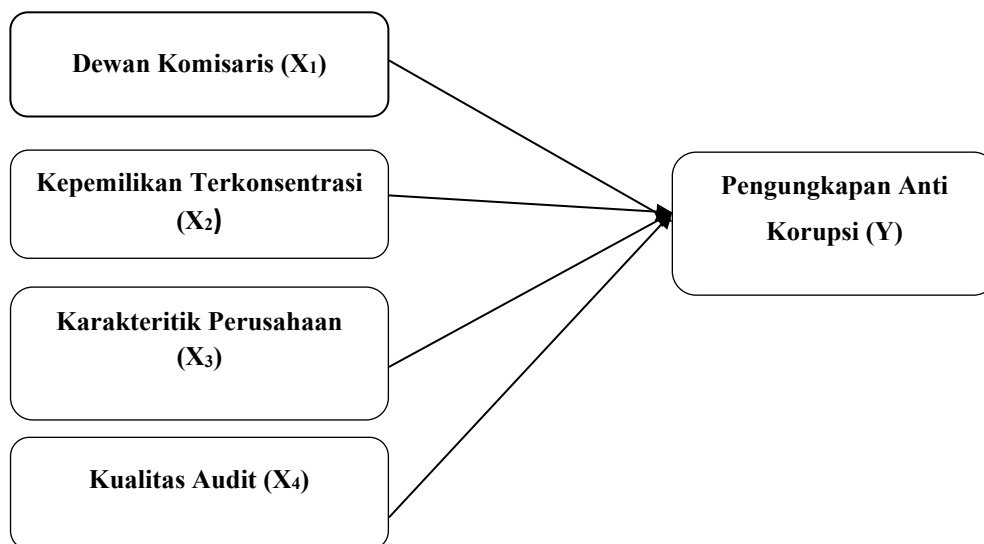
Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Antikorupsi

Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas auditor dalam menemukan dan melaporkan penyimpangan dalam laporan keuangan (DeAngelo, 1981). Dalam perspektif teori keagenan, auditor berperan sebagai pihak independen yang menjembatani kepentingan prinsipal dan agen dengan mengurangi asimetri informasi serta memastikan kewajaran laporan keuangan (Patrick et al., 2017). Audit yang berkualitas tinggi meningkatkan kredibilitas laporan

Pengaruh *Good Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Audit terhadap Pengungkapan Antikorupsi pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024 (Burhanuddin dan Ramma Nadia Putri)

dan mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam pengungkapan informasi. Oleh karena itu, perusahaan dengan kualitas audit yang lebih baik diharapkan memiliki tingkat pengungkapan antikorupsi yang lebih luas sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

H₄ : Kualitas Audit Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Antikorupsi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi didalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang bergerak di sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024 yang berjumlah 90 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan sektor energi yang memiliki laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) secara berkala dari periode 2022 – 2024. Kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan yang tidak menerbitkan Laporan Tahunan lengkap tahun 2022–2024. (2) Perusahaan yang tidak menerbitkan Laporan Keberlanjutan tahun 2022–2024. Hasil pemilihan sampel berdasarkan kriteria dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Kriteria Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah Perusahaan
Total Populasi Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI	91
Perusahaan yang tidak menerbitkan Laporan Tahunan lengkap tahun 2022–2024	(17)
Perusahaan yang tidak menerbitkan Laporan Keberlanjutan tahun 2022–2024	(3)
Jumlah sampel yang digunakan dan memenuhi kriteria dalam penelitian ini	71
Periode Tahun Pengamatan	3
Jumlah data penelitian yang digunakan dalam penelitian	213

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi tidak langsung. Teknik tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data *annual report* dan *sustainability report* perusahaan sektor energi periode 2022-2024 melalui website resmi www.idx.co.id atau website resmi masing-masing perusahaan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini menggunakan model regresi linier berganda serta dalam pengolahan data perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 27, yang bertujuan untuk membantu proses analisis statistik, seperti uji validitas, uji

reliabilitas, serta uji hipotesis, guna memperoleh hasil yang akurat dan dapat diinterpretasikan secara ilmiah. Rumus regresi berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \quad (1)$$

Keterangan:

- Y = Sustainability Report
- = Konstanta
- = Koefisien Regresi
- X₁ = Dewan Komisaris
- X₂ = Kepemilikan Terkonsentrasi
- X₃ = Karakteristik Perusahaan
- X₄ = Kualitas Audit
- = Error (tingkat kesalahan)

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yakni variabel dependen (y) dan variabel independen (x).

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat pada penelitian ini adalah pengungkapan antikorupsi (*Anti Corruption Disclosure*) yaitu menunjukkan komitmen perusahaan dalam mencegah, menanggulangi, memberantas korupsi. Pengukuran pengungkapan antikorupsi ini menggunakan indikator dari (Sarhan & Gerged, 2023) dan (Siska et al., 2025), sebagai berikut : (1) Menyatakan komitmen untuk menghindari penyuapan dan korupsi di kalangan manajemen puncak dan anggota dewan. (2) Menyertakan langkah-langkah anti-penyuapan dan korupsi yang diuraikan dalam kode etiknya. (3) Menyusun mekanisme internal untuk mengatasi penyuapan dan korupsi, termasuk sistem *whistleblowing*. (4) Menegakkan kebijakan yang bertujuan mencegah penyuapan dan korupsi dalam urusan bisnisnya. (5) Menawarkan program pelatihan yang sesuai bagi karyawan terkait langkah-langkah anti-penyuapan dan korupsi.

Semua item dicatat sebagai "Ya" atau "Tidak" untuk ada atau tidaknya pengungkapan pada setiap indikator. Setiap indikator diberi nilai 1 jika diungkapkan dan nilai 0 jika tidak diungkapkan.

$$ACD_j = \frac{\sum xy_j}{n_j} \times 100\% \quad (2)$$

Keterangan :

- ACD_j : Skor pengungkapann kebijakan antikorupsi perusahaan j.
- $\sum xy_j$: Jumlah indikator pengungkapan antikorupsi yang dipenuhi oleh perusahaan j.
- n_j : Jumlah total indikator pengungkapan antikorupsi yang digunakan dalam penelitian (5 indikator).

Variabel Independen (X)

Variabel independen (bebas) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen (terikat) sehingga menghasilkan sebab akibat terhadap variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Menurut (Febrina & Sri, 2022) dewan komisaris merupakan inti dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dan memastikan bahwa perusahaan sudah melaksanakan *good corporate governance*. Variabel dewan komisaris diukur berdasarkan jumlah dewan komisaris yang dimiliki perusahaan pada periode penelitian sebagaimana dijelaskan oleh (Permatasari & Prastiwi, 2023).

$$\text{Dewan Komisaris} = \sum \text{Dewan Komisaris Perusahaan} \quad (3)$$

Kepemilikan Terkonsentrasi

Perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi merupakan perusahaan yang kepemilikan sahamnya didominasi oleh individu atau institusi yang menguasai lebih dari 50% saham beredar. Pemegang saham utama dalam kondisi ini memiliki kekuatan yang lebih besar dalam mengarahkan kebijakan perusahaan, termasuk dalam mendorong pengungkapan kebijakan antikorupsi sebagaimana dijelaskan oleh (Susanti et al., 2020). Pengukuran variabel kepemilikan terkonsentrasi sebagai berikut:

Pengaruh *Good Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Audit terhadap Pengungkapan Antikorupsi pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024 (Burhanuddin dan Ramma Nadia Putri)

$$\text{Kepemilikan Terkonsentrasi} = \frac{\text{Saham yang dimiliki terkonsentrasi}}{\text{Total Saham}} \quad (4)$$

Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan mencerminkan kondisi dan skala operasional perusahaan yang dapat memengaruhi tingkat pengungkapan informasi. Dalam penelitian ini, karakteristik perusahaan diproksikan dengan ukuran perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural dari total aset sebagaimana dijelaskan oleh (Tirtasari & Hartomo, 2019). Untuk mengukur variabel karakteristik perusahaan yang menggunakan logaritma natural, sebagai berikut:

$$\text{Karakteristik Perusahaan} = \ln (\text{Total Asset}) \quad (5)$$

Kualitas Audit

Kualitas audit adalah bagian dari profesionalisme kerja auditor yang harus dipertahankan, hal ini untuk menciptakan reputasi yang baik bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana dikemukakan oleh (Rusli & Felix, 2022). Pengukuran untuk kualitas audit ini menggunakan variabel dummy, 1 Jika perusahaan diaudit KAP Big 4, 0 jika Perusahaan tidak diaudit KAP Big 4

Uji Statistik Deskriptif

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi dasar sehingga menghasilkan estimasi yang tidak bias dan konsisten (Ghozali, 2018). Pengujian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam model regresi memiliki distribusi normal sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan jika < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), di mana tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians residual antar pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengalami heteroskedastisitas. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser dengan kriteria jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan jika < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara residual pada periode saat ini dengan periode sebelumnya (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari autokorelasi. Pengujian dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson dengan membandingkan nilai DW terhadap batas bawah (dl) dan batas atas (du).

Pengujian Model Regresi Linear Berganda

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R² berada antara 0 sampai 1, di mana semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang semakin baik.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Jika nilai signifikansi < 0,05 maka model regresi dinyatakan signifikan secara simultan.

Uji Hipotesis Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2018). Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Untuk menentukan nilai terendah, tertinggi, nilai tengah, serta variabilitas data, metode statistik deskriptif digunakan dalam analisis ini. Hasil dari proses analisis ini disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	213	.0	1.0	.917	.1612
X1	213	1	9	2.23	1.111
X2	213	.00058	.99998	.57418	.16749
X3	213	20.86381	32.72231	28.84265	2.01742
X4	213	0	1	.30	.460
Valid N (listwise)	213				

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, jumlah data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 213 observasi. Variabel pengungkapan antikorupsi memiliki nilai minimum sebesar 0 dan maksimum sebesar 1, dengan nilai rata-rata sebesar 0,917 dan standar deviasi sebesar 0,1612. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan antikorupsi pada perusahaan relatif tinggi dengan variasi data yang rendah.

Variabel dewan komisaris memiliki nilai minimum sebesar 1 dan maksimum sebesar 9, dengan nilai rata-rata sebesar 2,23 dan standar deviasi sebesar 1,111. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris antarperusahaan cenderung tidak terlalu bervariasi.

Variabel kepemilikan terkonsentrasi memiliki nilai minimum sebesar 0,00058 dan maksimum sebesar 0,99998, dengan nilai rata-rata sebesar 0,57418 dan standar deviasi sebesar 0,16749. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan terkonsentrasi cukup tinggi dengan variasi data yang relatif rendah.

Variabel karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 20,86381 dan maksimum sebesar 32,72231, dengan nilai rata-rata sebesar 28,84265 dan standar deviasi sebesar 2,01742. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dalam sampel penelitian relatif bervariasi namun masih dalam rentang yang wajar.

Variabel kualitas audit memiliki nilai minimum sebesar 0 dan maksimum sebesar 1, dengan nilai rata-rata sebesar 0,30 dan standar deviasi sebesar 0,460. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam penggunaan Kantor Akuntan Publik Big 4 dan non-Big 4 dalam sampel penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data dalam penelitian ini memiliki distribusi yang sesuai dengan asumsi analisis regresi. Pengujian ini menjadi salah satu syarat penting agar model yang digunakan dapat menghasilkan estimasi yang tepat. Hasil pengujian normalitas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		213
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.07154751
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.186
	<i>Positive</i>	.186
	<i>Negative</i>	-.125
<i>Test Statistic</i>		.186
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)^c</i>		.201

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Pengaruh *Good Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Audit terhadap Pengungkapan Antikorupsi pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024 (Burhanuddin dan Ramma Nadia Putri)

Berdasarkan tabel 2 yang mana menggunakan uji *Non-Parametik Kolmogorov-Smirnov* (K-S) terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.201 menunjukkan lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Maka, dapat dikatakan bahwa data diatas terdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian ini diperlukan agar hubungan antar variabel dapat dianalisis secara tepat tanpa adanya gangguan hubungan yang terlalu kuat antar variabel bebas. Hasil pengujian disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Uji Multikolonieritas

<i>Coefficients^a</i>		
<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 (Constant)		
X1	.838	1.194
X2	.982	1.019
X3	.705	1.418
X4	.749	1.335

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa tidak terjadi multikolonieritas dalam model regresi, hal ini dikarenakan variabel independen (dewan komisaris, kepemilikan terkonsentrasi, karakteristik perusahaan dan kualitas audit) menunjukkan angka *Tolerance* diatas 0,1 dan angka *VIF* dibawah 10,00. Nilai *Tolerance* terbesar adalah 0,982 (kepemilikan terkonsentrasi) dan yang terkecil adalah 0,705 (karakteristik perusahaan) yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0.10. Sedangkan nilai *VIF* terbesar adalah 1,418 (karakteristik perusahaan) dan yang terkecil adalah 1,019 (kepemilikan terkonsentrasi) yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 10,00.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Pengujian ini diperlukan agar hasil analisis yang diperoleh lebih akurat. Hasil pengujian disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Uji Heterokedastisitas

<i>Coefficients^a</i>					
<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1 (Constant)	.103	.057		1.810	.072
X1	-.001	.003	-.031	-.440	.661
X2	.082	.019	.278	4.288	.060
X3	-.003	.002	-.122	-1.600	.111
X4	-.020	.009	-.174	-2.350	.120

a. Dependent Variable: Resid2

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Berdasarkan tabel 4 menggunakan uji *Glejser* dapat dilihat pada kolom *Sig.* bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas dalam model regresi, dikarenakan variabel independen (dewan komisaris, kepemilikan terkonsentrasi, karakteristik perusahaan, dan kualitas audit) menunjukkan nilai *sig.* lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Dengan masing-masing nilai *sig.* variabel yaitu sebesar 0,661 pada dewan komisaris, sebesar 0,060 pada kepemilikan terkonsentrasi, sebesar 0,111 pada karakteristik perusahaan, dan sebesar 0,120 pada kualitas audit.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antar residual pada suatu model regresi. Pengujian ini diperlukan untuk memastikan bahwa model yang digunakan tidak mengandung korelasi yang dapat mempengaruhi keakuratan hasil penelitian. Hasil pengujian disajikan pada tabel 5.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

<i>Model Summary^b</i>					
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	.536 ^a	.288	.274	.0722	1.189
a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3					
b. Dependent Variable: Y					

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Berdasarkan tabel 5 menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW) dapat dilihat bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 1,189. Sehingga nilai DW terletak diantara nilai dL dan dU atau $-2 < 1,189 < +2$. Dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi autokorelasi antara satu periode dengan periode sebelumnya.

Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Melalui pengujian ini, dapat dianalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti serta arah pengaruh yang dihasilkan. Hasil pengujian regresi linear berganda disajikan pada tabel 6.

Tabel 6. Uji Regresi Linear Berganda

<i>Coefficients^a</i>					
<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1 (Constant)	.564	.082		6.885	.000
X1	.013	.005	.164	2.565	.111
X2	.181	.028	.389	6.591	.000
X3	.007	.003	.176	2.525	.012
X4	.027	.012	.145	2.144	.033

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Dari nilai tersebut dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,564 + 0,013X_1 + 0,181X_2 + 0,007X_3 + 0,027X_4 + e \quad (6)$$

Hasil persamaan menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris, kepemilikan terkonsentrasi, karakteristik perusahaan dan kualitas audit memiliki koefisien positif. Ini berarti bahwa peningkatan masing-masing variabel independen cenderung meningkatkan pengungkapan antikorupsi.

Pembahasan

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Antikorupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan antikorupsi. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan dewan komisaris belum mampu secara efektif mendorong peningkatan transparansi perusahaan, khususnya dalam pengungkapan kebijakan antikorupsi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya fungsi pengawasan yang dijalankan dewan komisaris.

Dalam praktiknya, peran dewan komisaris sering kali masih bersifat formalitas untuk memenuhi ketentuan *good corporate governance*, sehingga belum mampu memberikan tekanan yang signifikan kepada manajemen. Selain itu, efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggota, tetapi juga oleh kualitas, independensi, dan kompetensi yang dimiliki, yang tidak tercermin dalam pengukuran penelitian ini. Di sisi lain, pengungkapan antikorupsi merupakan bagian dari *voluntary disclosure*, sehingga perusahaan memiliki keleluasaan dalam menentukan tingkat pengungkapannya.

Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung lebih memprioritaskan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan dibandingkan dengan pengungkapan kebijakan antikorupsi. Dalam perspektif teori agensi, dewan komisaris berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran tersebut belum berjalan secara efektif dalam mendorong transparansi pengungkapan antikorupsi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Safelia et al. (2023) dan Hayati et al. (2025), namun berbeda dengan Permatasari & Prastiwi (2023). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa peran dewan komisaris dalam mendorong pengungkapan antikorupsi masih bergantung pada efektivitas fungsi pengawasan dan karakteristik masing-masing perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi Terhadap Pengungkapan Antikorupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh terhadap pengungkapan antikorupsi. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh pemegang saham pengendali, semakin kuat fungsi pengawasan terhadap manajemen sehingga mendorong peningkatan transparansi perusahaan.

Secara konseptual, pemegang saham mayoritas memiliki kepentingan ekonomi yang lebih besar terhadap keberlangsungan perusahaan, sehingga cenderung melakukan monitoring yang lebih ketat terhadap tindakan manajemen. Pengawasan yang lebih intensif ini mendorong manajemen untuk mengurangi praktik oportunistik dan meningkatkan keterbukaan informasi, termasuk dalam pengungkapan kebijakan antikorupsi. Dengan demikian, kepemilikan terkonsentrasi berperan sebagai mekanisme pengendalian internal yang efektif dalam menekan asimetri informasi.

Temuan ini sejalan dengan perspektif teori agensi yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan dapat menjadi mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Achmad (2018) serta Zulfani & Solichin (2025), namun berbeda dengan Putri & Yustisi (2022) dan Rissdiana & Riduwan (2023). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kepemilikan terkonsentrasi dalam mendorong transparansi masih dipengaruhi oleh karakteristik dan kondisi perusahaan.

Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Antikorupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan yang diprosikan melalui ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan antikorupsi. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung mengungkapkan informasi antikorupsi secara lebih luas dibandingkan perusahaan yang lebih kecil.

Hal ini mengindikasikan bahwa, perusahaan besar memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks serta tingkat visibilitas yang lebih tinggi di mata publik, sehingga menghadapi tekanan yang lebih besar untuk bersikap transparan. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan informasi, termasuk kebijakan antikorupsi, sebagai upaya menjaga reputasi dan kredibilitas di hadapan pemangku kepentingan. Selain itu, perusahaan besar juga berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari investor, regulator, dan masyarakat, sehingga terdorong untuk menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang berintegritas.

Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial dengan menyesuaikan aktivitas serta pengungkapannya terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan yang lebih besar cenderung melakukan pengungkapan yang lebih luas sebagai bentuk respons terhadap tuntutan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Permatasari & Prastiwi (2023) serta Tyas & Rahmawati (2023), namun berbeda dengan Graciella et al. (2023). Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan antikorupsi masih bergantung pada karakteristik dan konteks masing-masing perusahaan.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Antikorupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap pengungkapan antikorupsi. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik bereputasi tinggi cenderung mengungkapkan informasi antikorupsi secara lebih luas.

Kondisi ini disebabkan oleh auditor dengan kualitas tinggi yang memiliki standar profesional, independensi, serta kehati-hatian yang lebih tinggi dalam proses audit. Untuk menjaga reputasi dan meminimalkan risiko litigasi, auditor mendorong perusahaan klien untuk menyajikan informasi secara lebih transparan, termasuk dalam pengungkapan kebijakan antikorupsi. Selain itu, auditor berkualitas tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menilai kepatuhan perusahaan terhadap regulasi serta mendeteksi potensi penyimpangan. Tekanan profesional tersebut mendorong manajemen untuk meningkatkan transparansi, tidak hanya pada informasi keuangan tetapi juga pada pengungkapan non-keuangan seperti kebijakan antikorupsi.

Dalam perspektif teori agensi, auditor eksternal berperan sebagai mekanisme pengawasan yang membantu mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik serta meminimalkan asimetri informasi. Oleh karena itu, keberadaan auditor dengan kualitas tinggi dapat meningkatkan kredibilitas dan kelengkapan pengungkapan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Zulfani & Solichin (2025), namun berbeda dengan Achmad (2018). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kualitas audit terhadap pengungkapan antikorupsi masih dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik perusahaan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan antikorupsi, sedangkan kepemilikan terkonsentrasi, karakteristik perusahaan, dan kualitas audit berpengaruh terhadap pengungkapan antikorupsi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu periode pengamatan yang relatif singkat serta penggunaan variabel independen yang masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya mampu menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan antikorupsi secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode penelitian serta menambahkan variabel lain yang relevan agar hasil penelitian menjadi lebih optimal.

Selain itu, bagi perusahaan diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan konsistensi dalam melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi, tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan juga perlu memperkuat penerapan *good corporate governance* agar kebijakan antikorupsi dapat diimplementasikan dan diungkapkan secara lebih optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, T. (2018). Pengaruh Kualitas Audit dan Auditor Switching terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan: Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 110–125. <https://doi.org/10.20961/jab.v18i2.380>
- Aprilia, Z. (2024). *Kasus Korupsi Timah Bikin Rugi Rp271 T, Ini Asal Usul & Rinciannya*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240406111011-17-528982/kasus-korupsi-timah-bikin-rugi-rp271-t-ini-asal-usul-rinciannya>
- Ardito Ramadhan, & Rastika, I. (2021). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di>
- Atikah, G. A., Yazid, F., & Prabowo, H. (2024). TRANSPARENCY IN CORPORATE REPORTING : Penilaian Perusahaan Tambang di Indonesia. In *Transparency International Indonesia*. <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/07/full-report-TRAC-Tambang.pdf>
- Berthelot, S., & Robert, A.-M. (2011). Climate Change Disclosures: An Examination of Canadian Oil and Gas Firms. *Issues In Social And Environmental Accounting*, 5(2), 106–123. <https://doi.org/10.22164/isea.v5i2.61>
- Budi, M. (2024). Auditor BPKP Jelaskan Perhitungan Kerugian Rp 300 T di Kasus Timah Baca artikel detiknews, “Auditor BPKP Jelaskan Perhitungan Kerugian Rp 300 T di Kasus Timah” selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7636532/auditor-bpkp-jelaskan-perhitungan-kerugian>. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-7636532/auditor-bpkp-jelaskan-perhitungan-kerugian-rp-300-t-di-kasus-timah>
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor independence, ‘low balling’, and disclosure regulation. *Journal of Accounting and Economics*, 3(2), 113–127. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(81\)90009-4](https://doi.org/10.1016/0165-4101(81)90009-4)
- Dewi, I. G. A. A. O., & Dewi, I. G. A. A. P. (2017). International Journal of Social Sciences and Humanities Corporate Social Responsibility, Green Banking, and Going Concern on Banking Company in Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(3), 118–134. <https://doi.org/10.21744/ijssh.v1i3.65>
- Febrina, V., & Sri, D. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 1. <https://doi.org/10.32524/jia.v1i1.478>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*.
- Graciella, T., Sutardja, M., & Setiono, B. (2023). Factors Influencing Anti-Corruption Disclosure in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 12(2). <https://doi.org/10.36766/ijag.v8i1.426>
- Hartomo, O. D., & Silvia, B. M. (2019). Antecedent Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(2), 196–209. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i2.2919>
- Hayati, L. W., Suma’a, M. I., Andini, D. P., Isra, I. M., & Zaitul. (2025). Pengungkapan Anti Korupsi dari Perspektif Corporate Governance. *Akademik : Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2025). *Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>
- Patrick, Z., Vitalis, K., & Mdoom, I. (2017). Effect of Auditor Independence on Audit Quality: A Review of Literature. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(3), 51–59. www.ijbmi.org
- Permatasari, S. Y., & Prastiwi, A. (2023). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(4), 2548–2507. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1638>
- Porta, R. La, Lopez-De-Silanes, F., & Shleifer, A. (1999). Corporate Ownership Around the World. *The Journal of Finance*, 54(2). <https://doi.org/10.1111/0022-1082.00115>
- Putri, D. D., & Yustisi, Y. P. (2022). Mekanisme Tata Kelola Internal dan Pengungkapan Antikorupsi Perusahaan Pengaruh *Good Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Audit terhadap Pengungkapan Antikorupsi pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024 (Burhanuddin dan Ramma Nadia Putri)

- di Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 1245–1254. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2683>
- Rissdiana, J., & Riduwan, A. (2023). Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12. <https://acch.kpk.go.id>
- Ristiana Widianing Tyas, & Rahmawati, I. P. (2023). Pentingkah Karakteristik Perusahaan Dan Tipe Industri Pada Pengungkapan Anti Korupsi? *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2), 291–308. <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i2.14076>
- Roodposhti, F. R., & Chashmi, S. A. N. (2011). The Impact Of Corporate Governance Mechanisms On Earnings Management. *African Journal of Business Management*, 5(11). <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2014-0039>
- Rusli, Y. M., & Felix, F. (2022). Anti Corruption Disclosure dan Good Corporate Governance Era New Normal di Asia Tenggara. *Jurnal Administrasi Kantor*, 1, 61–78. <http://www.ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JAK/article/view/2007%0Ahttp://www.ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JAK/article/download/2007/1464>
- Safelia, N., Z, R. W., & Zahwa, A. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021). *Jurnal Akuntansi & Keuangan UnJa*, 8(2), 155–169. <https://doi.org/10.22437/jaku.v8i2.27511>
- Sarhan, A. A., & Gerged, A. M. (2023). Do corporate anti-bribery and corruption commitments enhance environmental management performance? The moderating role of corporate social responsibility accountability and executive compensation governance. *Journal of Environmental Management*, 341, 1–49. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118063>
- Serafeim, P. H. and G. (2013). Causes and Consequences of Firms' Self-Reported Anticorruption Efforts. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2229039>
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1996). *A Survey Of Corporate Governance*.
- Sidharta, J., & S. Christianti. (2007). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kelengkapan Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi*, 17(2), 62–78.
- Silaban, F. P., & Suryani, E. (2020). Audit capacity stress. *E-Proceeding of Managemen*, 7(2), 2687–2695.
- Siska, Susanti, E., Yesitasari, & Juleita, T. A. P. (2025). Women and Corporate Transparency: Challenges in Anti-Bribery and Corruption Policies. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 209–226. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v8i1.709>
- Stefani Lily Indarto. (2023). Determinan Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi Ditinjau dari Good Corporate Governance dan Reputasi Auditor. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(3), 277–286. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i3.581>
- Susanti, D. L., Susanti, E., Agia, L. N., & Nurjannah, H. (2020). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Kepemilikan Keluarga dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclical. *Jurnal Ekonomi Kiat*, 31(1).
- Tirtasari, I. D. A., & Hartomo, O. D. (2019). Pengaruh GCG Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 17(2), 131. <https://doi.org/10.24167/jab.v17i2.2337>
- Widada, S., Tama, A. K. W., & Purnama, M. R. (2019). *Teknik Dasar Menggunakan Videografi di Dunia Broadcasting*. 5(1), 74–81.
- Wiyuda, A., & Pramono, H. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Terdaftar Di BEI. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Zulfani, N. W., & Solichin, M. (2025). Pengaruh Good Corporate Governance, Tingkat Kepemilikan Pemerintah dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Antikorupsi Di Perusahaan BUMN Tahun 2018-2022. *Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 5(2).